



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Konfirmasi Penarikan Kembali Uji Materi UU MD3**

**Jakarta, 19 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) pada Rabu (19/8), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pleno Konfirmasi Penarikan Kembali (Pencabutan) Perkara Oleh Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 1/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M yang berprofesi sebagai advokat.

Pemohon berpendapat adanya multitafsir dalam uu *a quo* terkait frasa “dan berakhir pada saat anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Seharusnya kata “anggota yang baru” harus dimaknai sebagai “orang baru”, bukan “periode baru”. Namun demikian, ternyata frasa itu ditafsirkan bukan sebagai pembatasan masa jabatan, melainkan sebagai justifikasi/legitimasi dapat dipilihnya anggota berkali-kali (tanpa batas) sehingga anggota yang lama dapat kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya tanpa ada pembatasan.

Dengan adanya multi tafsir tersebut, maka materi muatan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu ditafsirkannya materi muatan sebagai tidak terbatasnya masa jabatan anggota legislatif telah membawa suatu lembaga terpesok ke dalam penyalahgunaan wewenang/kekuasaan. Hal ini menyebabkan terciptanya kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dan belum dapat membawa pada tujuan ideal yang dicita-citakan dalam negara hukum, yaitu keadilan bagi semua orang.

Menanggapi permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (14/1), Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat terkait perlunya Pemohon dalam alasan permohonannya memperjelas argumentasi konstitusional. Sehingga secara substansi, permohonan tersebut pun dapat memperkuat kedudukan hukum Pemohon, yang telah dengan baik menguraikan keterkaitan Putusan MK terdahulu dengan pasal-pasal terkait. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta kepada Pemohon untuk melakukan studi komparasi terhadap penerapan masa jabatan dari seorang anggota dewan dalam pemerintahan yang menganut paham demokrasi.

Dalam sidang perbaikan permohonan (13/2), Pemohon menyampaikan terdapat beberapa poin perbaikan di antaranya menghapus keberadaan pembayar pajak dalam legal standing Pemohon karena menilai hal tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo*. Selanjutnya, Pemohon juga menambahkan alasan permohonan dengan menyajikan beberapa negara yang pernah menerapkan pembatasan masa jabatan anggota parlemen.

Sidang mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah (6/7), DPR berhalangan hadir, sedangkan Pemerintah melalui kuasa presiden dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Purwoko memohon penundaan sidang. “Kami masih memerlukan koordinasi terkait dengan keterangan Presiden dan juga sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Konstitusi pada 2 Juli 2020,” jelas Purwoko terkait permohonan yang dimohonkan oleh Ignatius Supriyadi. **(ASF/SRI)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)